

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki berbagai sumber penghasilan. salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar dan juga sangat berperan untuk membiayai pembangunan nasional (Muharam, 2018). Tetapi Masih terdapat hambatan dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, artinya masih banyak wajib pajak yang belum melapor dan membayar kewajiban pajak (Soraya & Fakhrana, 2018).

Pajak sangat berperan dalam pembangunan negara Indonesia karena pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara. Pembangunan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang baik. Salah satu bentuk peran masyarakat yang aktif dengan melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. dengan membayar pajak, secara tidak langsung masyarakat berperan dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pembangunan dan kesejahteraan lebih baik.

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting karena kegagalan untuk mematuhi mengarah pada upaya penghindaran pajak, yang mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak kas daerah. Oleh sebab itu, semakin akurat pembukuan,

pencatatan, penyetoran, dan pelunasan, juga penyajian surat pemberitahuan wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan kewajiban wajib pajak (Yulianti & Fauzi, 2020) .

Tingkat pendapatan wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sebab kebutuhan masyarakat masih tergantung dengan pendapatan yang didapat (Erlindawati & Novianti, 2020). Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda. Pada masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi tidak menjadi suatu masalah untuk membayar kewajiban perpajakannya, namun pada masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sekedar cukup untuk hidup sehari-harinya mungkin akan menjadi suatu masalah dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian Amran (2018), diketahui tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Donofan dan Afriyenti (2021), hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

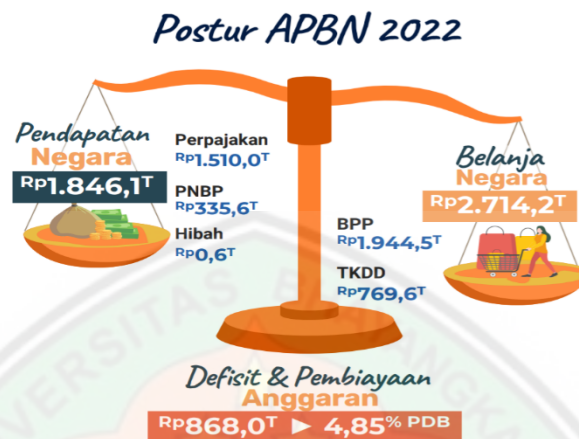
Kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Pelayanan merupakan aktivitas karena pelayanan berjalan dengan teratur dan berkesinambungan, seperti yang terjadi pada setiap lembaga di masyarakat (Budiawan & Nuryati, 2022). Salah satu upaya untuk meningkatkan

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga diterima oleh Masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan publik yang ditujukan agar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pelayanan yang ditujukan kepada wajib pajak ini berguna menjaga kepuasan wajib pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jika pelayanan kepada wajib pajak baik, maka mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun-tahun akan datang. Oleh karena kualitas pelayanan dianggap baik jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen (Lesmana, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Pratama dan Mulyani (2019), membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya tingkat kualitas pelayanan petugas pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Yuliatie dan Fauzi (2020), membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk memaksimalkan pendapatan negara disektor pajak. Pengetahuan mengenai pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan pengetahuan yang luas dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, tentunya peran petugas pajak juga sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Suryani & Sari, 2018).

Penerimaan Indonesia sangat mengandalkan sektor pajak. Dari informasi laporan pendapatan APBN tahun 2022 persentase penerimaan pajak mencapai 81.8%. seperti terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pendapatan Negara (Dalam Triliun Rupiah), 2022

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2022

Berdasarkan data pada postur APBN tahun 2022, pendapatan negara pada tahun 2022 sebesar 1.846,1 Triliun dengan kontribusi pendapatan dari sektor pajak sebesar 1.510 Triliun atau sebesar 81,8% dari total pendapatan, adapun penerimaan lainnya yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 333,6 Triliun dan Hibah sebesar 0,6 Triliun yang digunakan untuk kebutuhan belanja negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar pendapatan di sektor pajak direalisasikan dengan maksimal.

Selain pajak pusat, kita juga mengenal pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak

Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, dimana PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan atau bangunan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan pada hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan gotong royong nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan negara, oleh sebab itu dalam menetapkannya harus mengetahui asas kepastian hukum yang berlaku, keadilan, dan kesederhanaan. Serta harus didukung oleh sistem manajemen pajak yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (Muharam, 2018).

Berdasarkan informasi dari Kantor Kecamatan Mustika Jaya, realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Mustika Jaya pada tahun 2019 sampai 2021 masih jauh dibawah dari target yang sudah ditetapkan. hal ini terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan realisasi PBB Kecamatan Mustika Jaya

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
2018	11.991.637.466	15.418.680.180	128,58
2019	16.979.309.305	14.156.438.543	83,16
2020	17.713.648.934	13.284.335.514	75,61
2021	18.170.692.248	10.642.882.130	58,57

Sumber: (bekasikota.bps.go.id, 2023)

Berdasarkan data tabel 1.1 target dan realisasi PBB di Kecamatan Mustika Jaya pada tahun 2018 melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Sedangkan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 realisasi PBB disetiap tahunnya menurun cukup signifikan, Hal ini berarti masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak disebabkan oleh berbagai hal. Masyarakat berasumsi bahwa

membayar pajak merupakan hal yang merugikan dan menyebabkan berkurangnya pendapatan (Putrianingrum & Nuryati, 2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Anggara, 2022). Pengembangan dalam penelitian ini yaitu menambahkan satu variabel independen yaitu pengetahuan tentang pajak. Alasan menambahkan pengetahuan tentang pajak sebagai variabel independen karena dengan pengetahuan yang luas mengenai pajak akan meningkatkan informasi mengenai segala hal tentang pajak.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Mustika Jaya, Dengan alasan di Kecamatan Mustika Jaya masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase realisasi penerimaan PBB pada tahun 2019 sampai dengan 2021 yang masih jauh dibawah target. Sehingga Kecamatan Mustika Jaya sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dengan memilih judul” Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Studi Empiris pada WP OP di Kecamatan Mustika Jaya)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan penelitian yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari Rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan menggunakan konsep dan teknik penelitian yang sama.

2. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi dan sekaligus evaluasi pada pemerintah mengenai faktor yang menyebabkan ketidak patuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

3. Profesional

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, juga memiliki fungsi guna mengevaluasi pelayanan pajak sehingga kualitas pelayanan pajak menjadi lebih baik lagi.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori yang diperlukan dalam penelitian ini seperti: telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti penulis. di dalam bab ini terdapat gambaran objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

REFERENSI

